



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH DAERAH D.I. YOGYAKARTA
UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DIDIT SURANTO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 100743

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.227.800.000**

1. Tanah Seluas 88 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp.
176.000.000
2. Tanah Seluas 89 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp.
178.000.000
3. Tanah Seluas 870 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp.
783.000.000
4. Tanah Seluas 909 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp.
1.090.800.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 295.950.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2003, HASIL SENDIRI
Rp. 4.500.000
2. MOBIL, DAIHATSU HIJET MINI BUS Tahun 1984, HASIL SENDIRI
Rp. 3.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 1982, HIBAH TANPA
AKTA Rp. 4.000.000
4. LAINNYA, --- (SEPEDA) SEPEDA Tahun 2007, HASIL SENDIRI
Rp. 450.000
5. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 10.000.000
6. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 10.000.000



7. MOBIL, DAIHATSU TERIOS MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000

8. MOTOR, HONDA GL 100 Tahun 1982, LAINNYA Rp. 4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 112.400.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 75.874.340

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.712.024.340

III. HUTANG Rp. 358.857.970

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.353.166.370

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.